

BAB II

DINAMIKA HUBUNGAN DIPOMATIK KOREA UTARA DAN KOREA SELATAN

Didalam bab ini, penulis akan membahas dinamika hubungan diplomatik Korea Utara dan Korea Selatan yakni mengenai arah kebijakan luar negeri Korea Utara dan sejarah hubungan diplomatik antara kedua negara. Selain itu, penulis akan menjelaskan awal mula konflik antara Korea Utara dan Korea Selatan yang masih belum menemui kesepakatan, walaupun muncul upaya-upaya untuk melakukan perdamaian.

A. Kebijakan Luar Negeri Korea Utara Dibawah Kepemimpinan Kim Jong Un

Kebijakan luar negeri Korea Utara dapat dilihat dari kebijakan-kebijakan yang telah diterapkan oleh pemimpin tertinggi Korea Utara baik itu Kim Il Sung, kemudian Kim Jong Il dan juga Kim Jong Un yang saat ini menjabat sebagai pemimpin tertinggi negara tersebut. Kebijakan luar negeri Korea Utara juga tidak bisa dilepaskan dari pengaruh ideologi yang dianut yakni ideologi Juche. Ideologi Juche sendiri secara konseptual berarti otonom dan independen (*Self-Reliance*). Ideologi ini dikemukakan Kim Il Sung di depan umum pada Desember 1955, Kim Il Sung mengatakan dalam pidato itu sebagai berikut:¹⁴

"We are not engaged in any other country's revolution, but solely in the Korean revolution. This, the Korean revolution, determines the essence of juche in the ideological work of our Party.

Keterbukaan Korea Utara pada masa kepemimpinan Kim Il Sung terhadap dunia luar terlihat dari kebijakan yang diambil untuk menjalin hubungan atau kerjasama dengan organisasi-organisasi internasional seperti dengan wilayah Nodric pada tahun 1973, menjalin hubungan diplomatik dengan Australia

¹⁴ Charles K. Armstrong. *"Juche and North Korea's Global Aspirations"*. North Korea Internasional Documentation Project (NKIDP). Washington, DC. Hal. 3.

pada tahun 1974, ikut bergabung dengan *World Health Organization* (WHO) pada tahun 1973, bergabung dengan *the International Atomic Energy Agency* (IAEA) dan *Food and Agriculture Organization* (FAO) pada tahun 1977.¹⁵

Setelah meninggalnya Kim Il Sung pada tanggal 8 Juli 1994, Korea Utara dipimpin oleh Kim Jong Il yang merupakan anaknya sendiri. Dalam menjalankan roda pemerintahannya, Kim Jong Il masih memakai Juche sebagai ideologi dan kebijakan luar negeri Korea Utara, tetapi kebijakan untuk memperkuat bidang militer (*Military first*) lebih diutamakan oleh Kim Jong Il. Perbedaan dari kedua rezim yaitu Kim Il Sung dan Kim Jong Il sangat jelas terlihat disini, dimana masa kepemimpinan Kim Il Sung menggunakan ideologi Juche sebagai kebijakan luar negerinya membuat negaranya maju di sektor ekonomi, sedangkan pada masa kepemimpinan Kim Jong Il yang lebih mengedepankan *Military first* telah membuat negaranya semakin terpuruk di sektor ekonomi tetapi sangat maju di bidang militer. Selain itu, intensitas provokasi atau sikap deterrence terhadap Korea Selatan, Jepang maupun dunia internasional lebih banyak dilakukan oleh rezim Kim Jong Il daripada rezim Kim Il Sung. Bahkan pada tahun 2008, ditengah kekurangan pangan Korea Utara malah membeli senjata senilai \$65 juta dalam lima tahun terakhir.¹⁶

Setelah Kim Jong Il meninggal dunia, Kepemimpinan dilanjutkan oleh anaknya sendiri yaitu Kim Jong Un. Kim Jong-Un telah meraih dua gelar, yakni di bidang fisika dari Universitas Kim Il-Sung, dan satu lagi sebagai perwira angkatan bersenjata dari Universitas Militer Kim Il-Sung, ia adalah kepala negara termuda di dunia pada saat ini. Pada awal Maret 2013, Korea Utara mengancam akan melancarkan 'serangan nuklir

¹⁵ Tim Beal. *North Korea The struggle Against American Power*. 2005. Pluto Press. London. Hal. 274.

¹⁶ Artikel dalam http://www.bbc.co.uk/indonesian/news/story/2008/10/081006_nkorea.shtml Diakses pada tanggal 29 Maret 2019, Pukul 19.40 WIB.

preemptive' kepada Amerika Serikat, serta berencana untuk "menyapu habis" Pulau Baengnyeong milik Korea Selatan.¹⁷



Gambar 2. 1 Kim Jong Un

Rencana-rencana tersebut merupakan implementasi dari kebijakan luar negeri Korea Utara yang lebih banyak memanfaatkan militer sebagai sarana diplomasinya baik terhadap Korea Selatan maupun Amerika Serikat. Korea Utara memiliki dua fokus dalam kebijakan luar negerinya, yang pertama yaitu kerjasama khususnya dengan Republik Rakyat Tiongkok dan Rusia, dan yang kedua adalah perlawanan khususnya terhadap Korea Selatan dan sekutunya yakni Amerika Serikat.

Disamping itu, Korea Utara tetap menjalin hubungan kerjasama dengan berbagai negara di dunia, walaupun dikenal sebagai negara yang sangat tertutup. Sejak pembentukan Korea Utara pada 1948, negara tersebut telah memiliki hubungan diplomatik formal dengan lebih dari 160 negara dan

¹⁷ Andika Fajar Pratama Putra, Kebijakan Luar Negeri Korea Utara Dibawah Kepemimpinan Kim Jong Un Dalam Proliferasi Nuklir Terhadap Korea Selatan Tahun 2013-2015, Jurnal JOM FISIP, Volume 3, No. 2, Tahun 2016. Hal. 6.

mempertahankan 55 kedutaan dan konsulat di 48 negara. Sejumlah negara yang lebih kecil namun masih signifikan, 25 di antaranya memiliki misi diplomatik di Korea Utara, termasuk Inggris, Jerman dan Swedia, seperti yang ditunjukkan dalam pemetaan jaringan diplomatik oleh *Lowy Institute*.¹⁸

Selain itu, Korea Utara juga memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia. Hubungan antara Korea Utara dengan Indonesia sejauh ini terlihat tidak ada masalah, walaupun tidak berpengaruh secara signifikan bagi kedua belah pihak. Indonesia memiliki Kedutaan Besar di Pyongyang, begitupun sebaliknya, Korea Utara memiliki Kedutaan Besar di Jakarta. Hal tersebut membuktikan bahwa Korea Utara memiliki perhatian terhadap hubungannya dengan negara-negara di dunia Internasional.¹⁹

Bagi negara sosialis atau komunis, seperti Kuba, Venezuela, dan Laos, hubungan dengan Korut menguntungkan karena mereka bisa memberikan dukungan ideologi satu sama lain. Namun, walau ditempatkan di negara yang tidak seideologi, diplomat-diplomat Korut diharapkan bisa membela keluarga Kim dan menepis sentimen "bermusuhan". Sikap pembelaan ini bisa beraneka ragam, misalnya melabrak tukang cukur di London yang mengolok-olok gaya rambut Kim Jong-un.²⁰

Jaringan perwakilan diplomatik Korut di Asia, Eropa, Timur Tengah, dan Afrika punya peranan krusial dalam mendatangkan pendapatan, baik yang sah maupun ilegal. Kedutaan-kedutaan Korut di negara lain umumnya harus mendanai ongkos operasional secara mandiri. Bagaimanapun janggalnya sikap para diplomat Korut, negara Barat yang menerima kedutaan Korut dan memiliki kedutaan di Pyongyang, tetap melihat bahwa membuka jalur diplomatik dengan Korut bernilai dan bahwa diplomasi adalah solusi terbaik untuk

¹⁸ Artikel dalam https://www.republika.co.id/berita/internasional/_global/17/12/19/p177j3366-menengok-hubungan-diplomatik-negara-terisolasi-korut Diakses pada tanggal 29 Maret 2019, Pukul 19.50 WIB.

¹⁹ Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2019.

²⁰ Artikel dalam <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-42408236> Diakses pada tanggal 29 Maret 2019, Pukul 19.56 WIB.

masalah Korea. Hal tersebut sekaligus menegaskan bahwa betapapun rapuhnya hubungan Korut dan dunia luar, opsi diplomasi masih menjadi pilihan utama.²¹

B. Hubungan Diplomatik Korea Utara dan Korea Selatan

1. Sejarah Hubungan Diplomatik Korea Utara dan Korea Selatan

Berbicara mengenai sejarah hubungan diplomatik antara Korea Utara dan Korea Selatan, tentu tidak bisa dipisahkan dari sejarah konflik dan peperangan yang terjadi di Asia Timur khususnya di Semenanjung Korea. Pada Akhir abad ke-19, Korea adalah wilayah perebutan antara RRT, Rusia, dan Jepang. Pada tahun 1876, Jepang dan Korea mulai membentuk hubungan diplomatik di bawah desakan Jepang dan memulai perdagangan di antara kedua negara, yang mana memulihkan hubungan tradisional Korea dengan Cina (RRT).²²

Jepang memperlakukan Korea sebagai lahan taklukan dan menguasai banyak fungsi vital Korea, seperti hubungan luar negeri, kemiliteran, perbankan, dan perhubungan. Jepang secara resmi memulai aneksasinya terhadap Korea pada 1910. Atas aneksasinya, Jepang mengadopsi cara-cara pendudukan militer, menutup surat kabar dan majalah berbahasa Korea, dan memaksa orang Korea untuk beribadah di Kuil Shinto, serta Jepang juga mendesak beberapa tindakan yang dirancang untuk mengasimilasi penduduk Korea dengan cara melarang pemakaian Bahasa Korea dan nama bernuansa Korea.²³

Di bawah penjajahan Jepang, Korea juga dijadikan sebagai pusat militer dan ekonomi Kolonial Jepang. Jepang

²¹ *Ibid.*

²² Budiman Djoko Said Dalam Andi Nur Laela Sudirman, *Hubungan dan Kepentingan Timbal Balik RRT–Korea Utara di Semenanjung Korea*, Skripsi Universitas Hasanuddin, Tahun 2016. Hal. 60.

²³ Justin Wilson Said Dalam Andi Nur Laela Sudirman, *Hubungan dan Kepentingan Timbal Balik RRT–Korea Utara di Semenanjung Korea*, Skripsi Universitas Hasanuddin, Tahun 2016. Hal. 61.

menempatkan tuntutan ekonomi yang ketat di Korea, mendominasi perekonomiannya, dan mengeksploitasi buruh dan sumber daya alam Korea yang akhirnya membuat banyak orang Korea jatuh dalam kemiskinan. Jepang merekrut paksa 2,6 juta orang tenaga kerja yang merupakan masyarakat Korea, yang mana terdapat sekitar lebih dari 723.000 orang dikirim ke luar negeri serta kota-kota di Jepang.²⁴

Dalam rangka melepaskan diri dari penjajahan Jepang, Korea memiliki dua kelompok yang berbeda aliran. Kelompok pertama adalah kelompok komunis yang dipimpin oleh Kim Il Sung, yang mana bertujuan untuk mewujudkan reformasi pertahanan, penghapusan kelas dalam masyarakat, dan menyita semua kekayaan Jepang di Korea. Kelompok komunis Kim Il Sung mendapat banyak dukungan dari RRT, yang juga memusuhi Jepang, serta Uni Soviet. Sedangkan kelompok kedua adalah kelompok liberal yang dipimpin oleh Syngman Rhee yang banyak dipengaruhi oleh Bangsa Barat (Amerika Serikat).²⁵

Sejak semenanjung Korea terbebas dari penjajahan Jepang, Korea akhirnya merdeka pada tahun 1945. Tetapi, yang menjadi masalah adalah terdapat perbedaan pandangan untuk membentuk sebuah negara yang berdaulat dari dua kelompok yang ada di Korea. Di satu sisi menginginkan pembentukan sebuah negara komunis karena didukung oleh Uni Soviet, di sisi yang lain menginginkan negara yang liberal karena dipengaruhi oleh Amerika Serikat. Secara sederhana, bagian utara Semenanjung Korea diduduki oleh Uni Soviet sedangkan bagian selatan diduduki oleh Amerika Serikat. Dua negara itu merupakan anggota negara sekutu

²⁴ Djato Prihantono Dalam Andi Nur Laela Sudirman, *Hubungan dan Kepentingan Timbal Balik RRT–Korea Utara di Semenanjung Korea*, Skripsi Universitas Hasanuddin, Tahun 2016. Hal. 61.

²⁵ Andi Nur Laela Sudirman, *Hubungan dan Kepentingan Timbal Balik RRT–Korea Utara di Semenanjung Korea*, Skripsi Universitas Hasanuddin, Tahun 2016. Hal. 62.

yaitu pemenang perang dunia II.²⁶ Kedua belah pihak tidak bisa disatukan bahkan hingga saat ini, yang pada akhirnya Korea dibagi menjadi dua wilayah sebagaimana isi dari Konferensi Postdam pada tanggal 11 Agustus 1945.

Uni Soviet dan Amerika Serikat berusaha untuk membentuk pemerintahan pada masing-masing wilayah yang pada akhirnya terbentuk *Democratic People of Republic Korea* atau yang dikenal dengan Korea Utara dan *Republic of Korea* yang dikenal dengan sebutan Korea Selatan. Pemisahan kekuasaan Korea Utara dan Korea Selatan ini diketahui dan dibawah arahan PBB, hal ini dilakukan karena tidak adanya titik temu antara Uni Soviet dan Amerika Serikat dalam mengimplementasikan amanat PBB dalam penyatuan terhadap wilayah Korea.²⁷

Sejak kedua kelompok dipisahkan dan memiliki wilayahnya masing-masing, sejak itu pula pertempuran antara keduanya dimulai. Pertempuran dilakukan karena adanya keinginan dari salah satu pihak untuk menguasai keseluruhan semenanjung Korea. Gencatan senjata mengakhiri pertempuran di Korea pada 1953. Namun gencatan senjata tersebut hanyalah bersifat sementara dan bukan merupakan sebuah perjanjian perdamaian. Kedua negara, Korea Utara dan Korea Selatan, hanya sepakat untuk tidak sepakat untuk menghentikan baku tembak dan memindahkan perang dari medan tempur ke medan diplomatik, sehingga kedua negara terus berada dalam situasi perang di sepanjang garis demarkasi selama lebih dari setengah abad.²⁸

Pasca gencatan senjata tersebut, barulah kedua negara memiliki hubungan yang menjadi awal hubungan diplomatik. Pada bulan April 1956, prinsip dasar untuk penyatuan secara damai di Semenanjung Korea ditegaskan dalam deklarasi

²⁶ Yang Seung-Yoon dan Mohtar Mas'oeed, *Memahami Politik Korea*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005), Hal. 237.

²⁷ William Stueck, *The Korean War: an International History*, (New Jersey: Princeton University Press, 1999), Hal. 26-27.

²⁸ *Ibid.*, Hal. 66.

“Penyatuan Kembali Negara Secara Damai” oleh Korea Utara dan Korea Selatan, tetapi tidak terwujud. Perbedaan sistem antara Korea Utara dan Korea Selatan semakin mempertajam hubungan pertentangan. Pasca Perang Korea, konflik militer dan pertentangan kekuatan militer sering kali terjadi, dan jarang diadakan dialog sampai tahun 1960-an. Penyatuan antar Korea secara sempurna mengarah pada sistem politik tunggal, pemerintahan yang bersatu, tidak bisa diwujudkan dalam waktu singkat tetapi diperlukan waktu yang cukup panjang.²⁹

Memasuki tahun 1970-an dunia internasional menjadi lebih damai. Korea Utara dan Korea Selatan saling mengakui pemerintahan masing-masing, hal ini menandai sebuah perubahan penting dalam sikap kedua Korea terhadap reunifikasi. Korea Selatan menyerukan untuk melakukan kompetisi perdamaian secara jujur dengan Korea Utara.³⁰

Pada tanggal 20 September 1971, perwakilan dari Korea Utara dan Korea Selatan bertemu di desa Panmunjom dan memulai perundingan yang pertama. Kesepakatan yang bernama “Pernyataan Bersama antar Korea”, dicetuskan pada tanggal 4 Juli 1972, merupakan satu langkah penting menuju proses penyatuan kembali Korea. Dalam pernyataan tersebut, kedua belah pihak menyatakan pentingnya usaha untuk memulihkan dan mewujudkan kembali penyatuan Korea terlepas dari pembedaan sistem politik dan ideology.³¹

2. Dinamika Hubungan Diplomatik Korea Utara dan Korea Selatan

Hubungan diplomatik antara Korea Utara dan Korea Selatan diwarnai dengan pasang surut dan sensitifitas yang tinggi. Di satu sisi, Korea Utara menunjukkan kebijakan luar

²⁹ Yang Seung-Yoon dan Mohtar Mas'oeed. Masyarakat, Politik, dan Pemerintahan Korea. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2003. Hal. 119.

³⁰ Sapardi Djoko Damono. Selamat Datang di Korea. Jakarta : Grafika Indah, 2001. Hal. 46.

³¹ Djoko Suryo, dkk. Sejarah Korea. Yogyakarta : Pusat Studi Korea, 2005. Hal. 100.

negerinya beriringan dengan kebijakan-kebijakan terkait militer yaitu uji coba senjata nuklir. Di sisi yang lain, Korea Selatan terus berupaya melakukan diplomasi preventif terhadap Korea Utara dengan tujuan untuk menghentikan aksi-aksi provokatif Korea Utara.

Menyadari situasi dan keadaan yang jelas berbeda antar Korea, maka pemerintah Korea Selatan mulai menekankan pentingnya kebersamaan, perdamaian dan peningkatan kerjasama. Pada tahun 1990, pemerintah Korea Selatan berusaha mengadakan kontak dan kerjasama dengan Korea Utara mengingat perekonomian nasional memburuk, usaha pemerintah Korea Selatan justru mengarahkan Korea Utara menuju sikap yang keras yakni meningkatkan kekuatan militer dan mengembangkan senjata modern. Korea Selatan pun tidak menyerah dan tetap berusaha mendekati Korea Utara untuk melakukan kebijakan diplomatik dan mengadakan beberapa pertemuan dengan Korea Utara.³²

Aksi-aksi provokatif Korea Utara tidak terlepas dari dinamika hubungannya dengan Korea Selatan, yang oleh pihak Korea Utara juga dinilai telah melakukan aksi-aksi provokatif yang mengancam keamanan negaranya, terutama melalui kegiatan latihan militer gabungan Korea Selatan dan AS di sekitar Semenanjung Korea. Tidak dapat dihindari, bahwa dinamika hubungan Korea Utara dan Korea Selatan akan berkaitan juga dengan AS yang selama ini menjadi sekutu utama Korea Selatan pascaberakhirnya Perang Korea, dan juga memiliki kepentingan dengan situasi keamanan di Semenanjung Korea. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika kemudian dalam dinamika hubungan Korea Utara-Korea

³² Yang Seung-Yoon dan Mohtar Mas'ood. Masyarakat, Politik, dan Pemerintahan Korea. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2003. Hal. 120.

Selatan tersebut kehadiran AS menjadi bagian yang tidak terpisahkan.³³

Pertemuan puncak antara pemimpin Korea Utara, Kim Yong Il dan presiden Korea Selatan, Kim Dae Jung, pada tahun 1999 di Pyongyang, ibukota Korea Utara, mengandung arti dalam sejarah pemisahan Korea. Korea Utara dan Korea Selatan telah menghapuskan hubungan permusuhan dan menciptakan hubungan kerukunan dan hubungan kebersamaan yang damai. Korea Selatan, terus memberikan bantuan ekonomi kepada masyarakat Korea Utara serta berusaha mewujudkan reunifikasi bangsa Korea.³⁴

Hubungan Korea Utara dan Korea Selatan mengalami pasang surut dalam artian di satu waktu membaik, di lain waktu bisa memburuk. Misalnya, hubungan kedua Korea yang telah membaik kembali memanas semenjak diangkatnya Presiden Lee Myung Bak (2008-2013). Lee Myung Bak memiliki pandangan dan sikap politik yang berbeda dari para pendahulunya dalam menilai dan menyikapi Korea Utara. Di bawah kebijakan baru, Korea Selatan akan menyediakan bantuan ekonomi bagi Korea Utara selama 1 dasawarsa untuk membantu meningkatkan pendapatan perkapita Korea Utara hingga 3000 dolar, namun dengan syarat Korea Utara harus melumpuhkan semua program nuklirnya.³⁵

Menurut Yongho Kim dalam tulisannya *“Inconsistency or Flexibility? The Kim Young Sam Government’s North Korea Policy and Its Domestic*

³³ Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Dialog Korea Utara-Korea Selatan Dan Dampaknya Terhadap Keamanan Kawasan, Volume X, No. 02, Tahun 2018. Hal. 9.

³⁴ Yang Seung-Yoon dan Mohhtar Mas’oed. Masyarakat, Politik, dan Pemerintahan Korea. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2003. Hal. 122.

³⁵ Muhammad Farid Arfan, Motivasi Korea Utara Memutuskan Hubungan Kerjasama Dengan Korea Selatan Dikawasan Industri Kaesong, Jurnal JOM FISIP, Volume 5, No. 1, Tahun 2018. Hal. 2.

Variants”, Korea Utara dan Korea Selatan melakukan pembaruan dalam kerja sama yang tertuang dalam “*Sunshine Policy*”. Ada beberapa poin yang disepakati misalnya dalam bidang ekonomi. Pemerintah Korea Utara mendorong pebisnis asal Korea Selatan untuk berinvestasi guna meningkatkan interaksi ekonomi kedua negara. Poin lainnya dalam *Sunshine Policy* adalah soal bantuan kemanusiaan. Korea Selatan bersedia menyalurkan makanan dan bantuan lainnya bagi Korea Utara baik melalui organisasi internasional atau pun disalurkan langsung ke Korea Utara.³⁶

Adanya pengembangan nuklir di Negara tetangganya, membuat Korea Selatan dan Korea Utara terlibat permusuhan dan persaingan terkait perlombaan senjata dan bersikap saling waspada satu sama lain bahkan hingga saat ini. Dimana hal inilah yang membuat Korea Selatan pada akhirnya membuat kebijakan terkait pertahanan keamanan untuk mengantisipasi ancaman nuklir Korea Utara.

C. Konflik Antara Korea Utara dan Korea Selatan

Konflik yang sudah berlangsung lama antara Korea Utara dan Korea Selatan tidak hanya menjadi perhatian pihak-pihak yang berkepentingan saja seperti halnya Amerika Serikat ataupun China, tetapi juga menjadi perhatian masyarakat Internasional. Perang tersebut tentu menjadi beban bagi semua pihak mengingat banyaknya korban yang berjatuh dan juga kerugian materiil yang didapatkan.

Meskipun Perang Korea berakhir pada 1953, secara teknis, Korea Utara dan Korea Selatan masih berperang karena perang itu dihentikan hanya oleh perjanjian gencatan senjata. Perang Korea telah memberikan kerugian yang sangat besar bagi kedua negara dan menimbulkan dampak negatif terhadap keamanan kawasan. Perkiraan korban tentara yang meninggal dunia akibat perang ini antara lain: pasukan Korea Utara sebanyak 508.797 orang, pasukan China sebanyak 148.600 orang, Pasukan Korea Selatan sebanyak 137.899 orang, dan Pasukan PBB sebanyak

³⁶ Artikel dalam <https://tirto.id/perseteruan-abadi-korea-utara-korea-selatan-clqs> Diakses pada tanggal 29 Maret 2019, Pukul 20.16 WIB.

40.670 orang. Sementara korban di pihak sipil (termasuk yang meninggal dunia, hilang dan terluka) sebanyak 1.5 juta orang di Korea Utara, dan 990.968 orang di Korea Selatan.³⁷

Situasi perang yang belum berakhir di antara kedua Korea tersebut berpengaruh pada perjalanan hubungan Korea Utara dan Korea Selatan, termasuk ketika Korea Utara dipimpin oleh Kim Jong-Un (saat ini). Di bawah kepemimpinan Kim Jong-Un, hubungan Korea Utara dan Korea Selatan lebih banyak diwarnai oleh ketegangan, yang disebabkan aksi provokasi Korea Utara dengan berbagai uji coba peluru kendali dan program nuklirnya.³⁸

Rentetan peristiwa di awal-awal konflik antara Korea Utara dan Korea Selatan yang berhasil penulis rangkum yakni sebagai berikut:³⁹

1. Kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II pada 1945 mengakhiri pendudukan negara itu di Korea. Ini menyebabkan semenanjung terbagi sepanjang paralel ke-38, yaitu antara rezim Kim Il Sung di Korut yang didukung Uni Soviet serta Korsel di bawah perlindungan AS.
2. Pada Juni 1950, Korut yang kemudian dibantu oleh China, menginvasi Korsel. Namun koalisi yang dipimpin AS berhasil merebut kembali Seoul dari cengkraman Korut dan sekutunya.
3. Perjanjian gencatan senjata ditandatangani pada Juli 1953, menghentikan perang kedua negara. Namun kedua negara belum pernah menekan kesepakatan damai permanen hingga saat ini. Sejak itu pula AS memberlakukan sanksi terhadap Korut.

³⁷ Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Dialog Korea Utara-Korea Selatan Dan Dampaknya Terhadap Keamanan Kawasan, Volume X, No. 02, Tahun 2018. Hal. 8.

³⁸ *Ibid.*

³⁹ Artikel dalam https://www.inews.id/news/read/138637/perjalanan-sejarah-pasang-surut-hubungan-diplomatik-as-dan-korut?sub_slug=internasional Diakses pada tanggal 29 Maret 2019, Pukul 20.48 WIB.

4. Kapal perang USS Pueblo ditangkap Korut pada 1968 atas tuduhan melanggar wilayah. Seluruh kru yakni 83 orang disandera selama 11 bulan.
5. Pada 1988, untuk pertama kalinya, AS memasukkan Korut dalam daftar hitam sebagai negara sponsor teroris karena diduga terlibat dalam pengeboman pesawat Korsel pada 1987 yang menewaskan 115 orang.
6. Pada 1988, untuk pertama kalinya Korut menguji coba rudal jarak jauh. Setahun setelah tes pertama rudal balistik jarak jauh, Kim Jong Il mengumumkan penangguhan uji coba rudal dengan imbalan AS meredakan sanksi.

Beberapa peristiwa diatas merupakan sebagian kecil dari sejarah panjang konflik antara Korea Utara dan Korea Selatan. Tetapi, yang perlu penulis soroti adalah semakin membaiknya hubungan kedua negara hingga tercapai pertemuan pada tahun 2018 yang merupakan awal mula komitmen untuk memperbaiki hubungan diantara kedua Korea tersebut.

D. Berbagai Upaya Perdamaian dan Terwujudnya Pertemuan Antara Pemimpin Korea Utara dan Korea Selatan Pada Tahun 2018

Pada 27 April 2018 dunia menyaksikan peristiwa penting yang terjadi di Semenanjung Korea, ketika Presiden Korea Selatan, Moon Jaen, dan Pemimpin Korea Utara, Kim Jong Un, berjabat tangan di garis demarkasi militer yang memisahkan kedua Korea di Desa Panmunjom. Pertemuan mereka memicu harapan lahirnya perdamaian dan denuklirisasi di Semenanjung Korea.

Jauh sebelum pertemuan tahun 2018 diadakan, telah terjadi berbagai upaya pertemuan dengan tujuan untuk perdamaian. Misalnya pada tahun 2008, dalam upaya untuk meningkatkan kualitas hubungan inter-Korea, Presiden Korea Selatan pada waktu itu, Lee Myung Bak pun telah merancang sejumlah tujuan dan rencana kerja dalam kebijakannya terhadap Korea Utara, termasuk rencana aksi yang dinilai *favourable* bagi Korea Utara sehingga dapat mencegah kemungkinan adanya aksi-aksi provokatif atau perilaku yang tidak diinginkan dari Korea Utara. Korea Selatan memperkenalkan Visi 3000 atau

Vision 3000 thru Denuclearization and Openess yang merupakan kebijakan operasional dari kebijakan 'Utara' Korea Selatan, *Mutual Benefits and Common Prosperity Policy*.⁴⁰

Ide dari Visi 3000 tersebut utamanya ditujukan untuk mengatasi isu nuklir Korea Utara yang selama ini merupakan batu penghalang paling besar bagi kemajuan dan perkembangan hubungan inter-Korea, yakni dengan menawarkan peningkatan bantuan aktif untuk membantu meningkatkan endapatan per kapitanya hingga 3.000 US dollar dalam sepuluh tahun, jika halnya Korea Utara meninggalkan senjata nuklirnya. Kebijakan tersebut mengimplikasikan bahwa selama disana terdapat perkembangan dalam proses denuklirisasi oleh Korea Utara, maka Korea Selatan akan menyediakan paket dukungan yang menawarkan rekonstruksi ekonomi dan peningkatan hidup warganya termasuk pendidikan, modal, infrastruktur dan kesejahteraan.⁴¹

Selain itu, Pertemuan Tingkat Tinggi Pertama antar Korea yang dihadiri oleh Presiden Korsel Kim Dae-Jung dan Pemimpin Korut Kim Jong-il, di Pyongyang pada 13-15 Juni 2000 juga menjadi salah satu momentum bersejarah. Pertemuan tersebut menghasilkan deklarasi bersama antar Korea pada 15 Juni 2000, yang menghasilkan kerangka kerja bagi institusionalisasi koeksistensi damai antara dua negara Korea. Keputusan Pemimpin Korut Kim Jong-il untuk menghadiri pertemuan tersebut merupakan simbolisasi perubahan kebijakan strategisnya terhadap Korsel. Proses perdamaian baru antar-Korea terus dilakukan untuk membangun rasa saling percaya dan saling memahami dalam rangka menciptakan perdamaian abadi di Semenanjung Korea.⁴²

⁴⁰ Arfin Sudirman, Korea Selatan dan Provokasi Korea Utara: Taktik Pengaruh dan Persuasi pada masa pemerintahan Lee Myung Bak. *Jurnal Wacana Politik*, Vol.3 No.1, Tahun 2018. Hal. 85.

⁴¹ *Ibid.*

⁴² Indriana Kartini, Deklarasi Panmunjeun dan Prospek Perdamaian Korea di Era Moon Jae In dan Kim Jong Un. *Jurnal Penelitian Politik*, Vol. 15, No.1, Tahun 2018. Hal. 2.

Pada tahun 2018, secara mengejutkan pemimpin Korea Utara, Kim Jong Un dan pemimpin Korea Selatan, Presiden Moon Jae-in menandatangani Deklarasi Panmunjom Pada 27 April 2018, dalam pertemuan Tingkat Tinggi Antar-Korea (*Inter-Korean Summit Meeting*) pada 27 April 2018. Peristiwa ini merupakan momentum sejarah yang merefleksikan aspirasi yang tak kunjung padam dari rakyat Korea bagi terciptanya perdamaian, kesejahteraan dan unifikasi di Semenanjung Korea yang secara teknis masih dalam kondisi perang. Kedua pemimpin negara mendeklarasikan dihadapan 80 juta rakyat Korea dan publik dunia bahwa tidak akan ada perang di Semenanjung Korea sekaligus menegaskan bahwa momen ini menandai era baru perdamaian.⁴³

Setelah peristiwa penting tersebut, kedua belah pihak melakukan pertemuan bilateral bersejarah yang menghasilkan janji dan komitmen untuk mengakhiri Perang Korea secara resmi dengan perjanjian perdamaian yang permanen. Mereka juga berjanji bekerja sama dalam mengupayakan terwujudnya denuklirisasi Semenanjung Korea. Pertemuan antarpemimpin kedua Korea ini mendapatkan perhatian dari seluruh dunia, mengingat kondisi hubungan kedua negara yang selama ini tidak positif.⁴⁴

Ketika Kim Jong Un menjabat tangan dengan Presiden Moon untuk pertama kalinya, dia berkata; "*Saya sangat senang bertemu di tempat bersejarah ini dan itu benar-benar menggerakkan hati saya, bahwa Anda datang jauh-jauh ke garis demarkasi untuk menyambut saya secara pribadi.*" Presiden Moon menjawab; "*Itu adalah keputusan besar yang Anda ambil dan jadi kenyataan di sini.*" Presiden Moon juga mengatakan bahwa ia berharap keduanya dapat "*terlibat dalam pembicaraan jujur dan mencapai kesepakatan yang berani sehingga dapat*

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ Simela Victor Muhammad, Perdamaian Di Semenanjung Korea Pasca-Pertemuan Moon Jae-In Dan Kim Jong Un, Jurnal Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Volume X, No. 9, Tahun 2018, Hal. 7.

memberikan hadiah besar kepada seluruh bangsa Korea dan setiap orang yang cinta damai di dunia.⁴⁵



Gambar 2. 2 Kim Jong Un dan Presiden Moon di Perbatasan

Pembicaraan bilateral bersejarah ini menghasilkan sejumlah kesepakatan, yaitu:⁴⁶

1. Korea Selatan dan Korea Utara akan meningkatkan hubungan demi kesejahteraan bersama dan bersatu kembali secara mandiri
2. Korea Selatan dan Korea Utara akan bekerja sama mengurangi ketegangan militer
3. Korea Selatan dan Korea Utara akan bekerja sama mewujudkan perdamaian abadi Semenanjung Korea.

Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un dan Presiden Korea Selatan Moon Jae-in juga sepakat akan meneken kesepakatan damai dan mengakhiri perang kedua negara yang selama 65

⁴⁵ Artikel dalam <https://www.dw.com/id/pemimpin-dua-negara-korea-gelar-pertemuan-bersejarah/a-43558583> Diakses pada tanggal 29 Maret 2019, Pukul 21.24 WIB.

⁴⁶ Simela Victor Muhammad, Hal. 9.

tahun hanya dijeda gencatan senjata. Walaupun, prosesnya dinilai masih dihadapkan pada banyak rintangan.⁴⁷ Pertemuan tersebut merupakan sebuah pertemuan besar yang bersejarah tidak hanya bagi kedua negara, tetapi juga bagi masyarakat Internasional, mengingat begitu panjangnya perjalanan konflik antara kedua negara.

⁴⁷ Artikel dalam https://www.cnnindonesia.com/internasional/2018_0427172601-113-294191/masih-banyak-rintangan-menuju-perdamaian-semenanjung-korea Diakses pada tanggal 29 Maret 2018, Pukul 21.29 WIB.